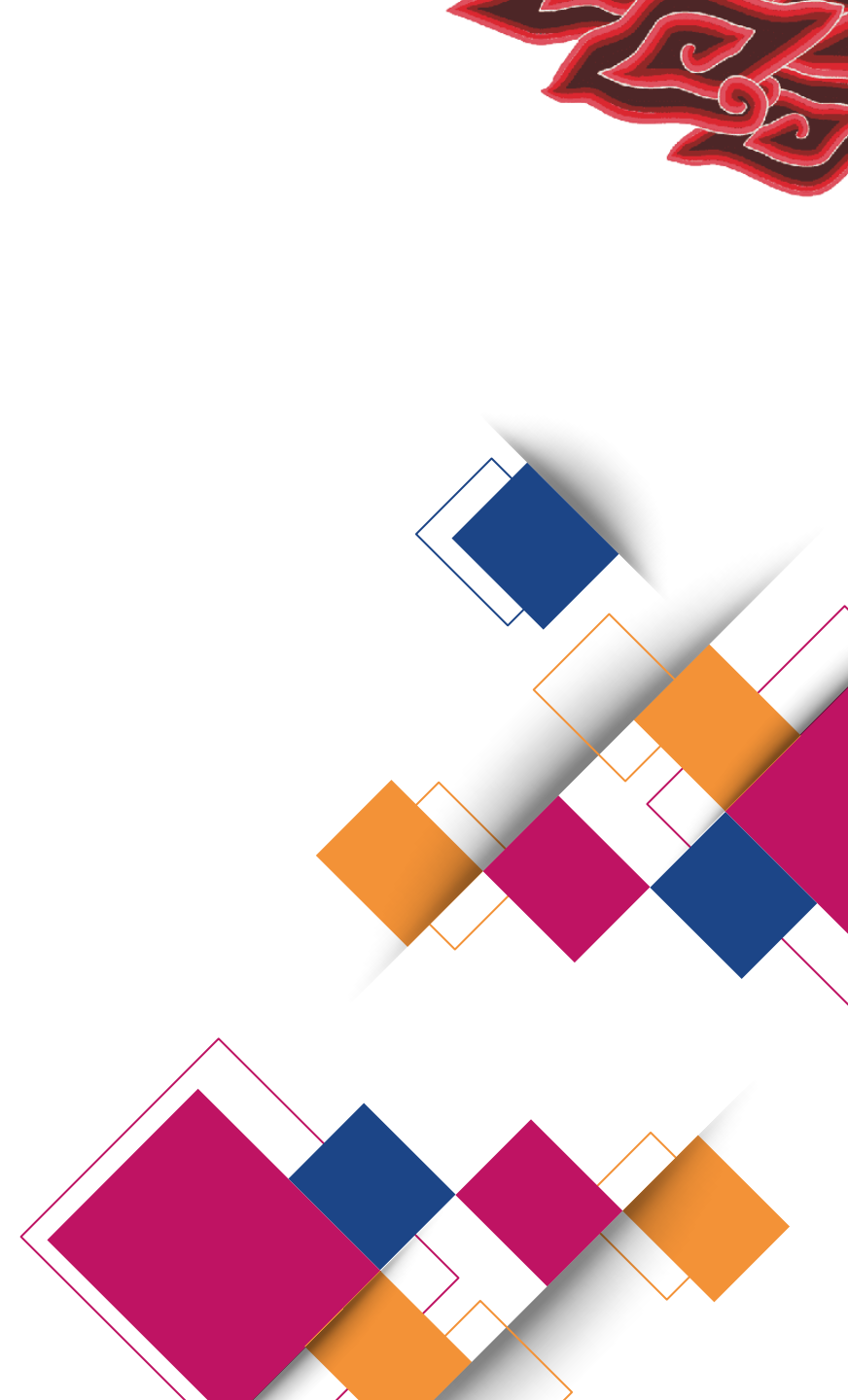


SOSIALISASI TEKNIS

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2023**

JUMAT 8 SEPTEMBER 2023





BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 802/Kep.344-Org/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

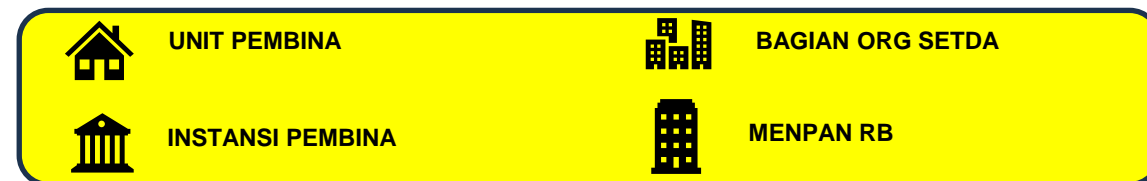
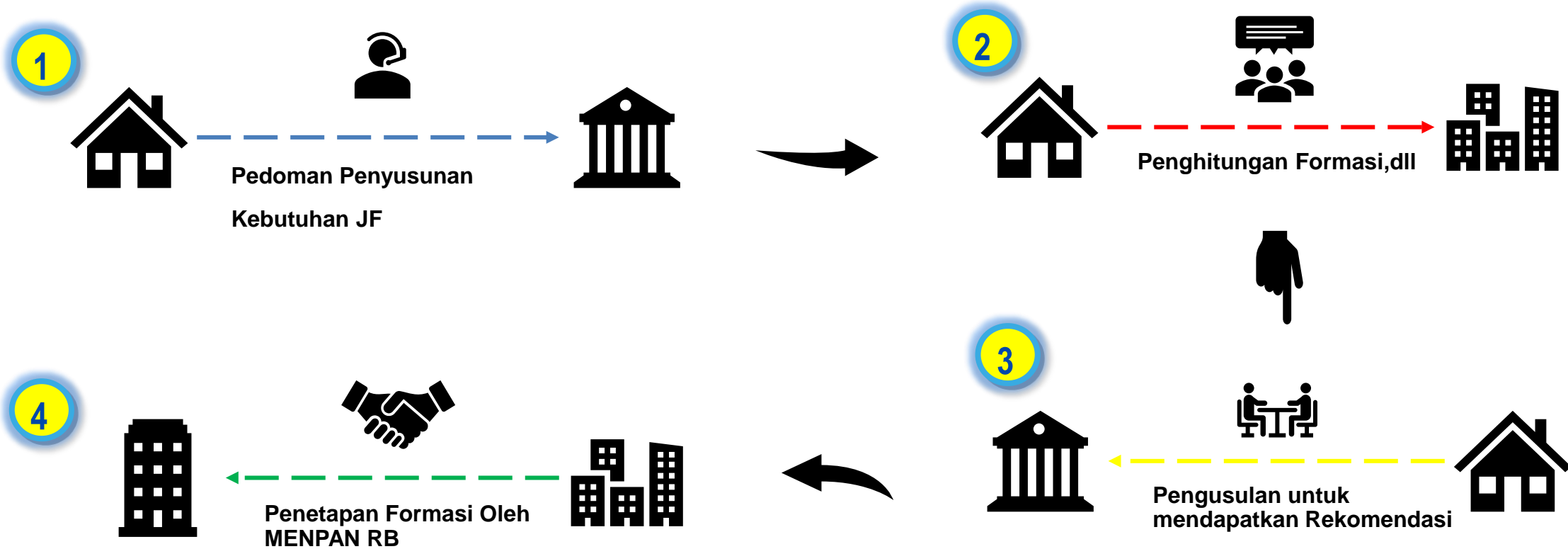
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan formasi, pembinaan karier, peningkatan mutu dan profesionalitas Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk unit pembina jabatan fungsional di masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



**Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 802/Kep.344-
Org/2022 tanggal 30 Juni
2022 yang mengatur tentang
Unit Pembina Jabatan
Fungsioanl di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Cirebon**

MEKANISME PENETAPAN FORMASI JF



➤ PROGRESS PENETAPAN FORMASI JF

Data dari Bagian Organisasi Setda

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	UNIT PEMBINA	INSTANSI PEMBINA	Usulan ke Instansi Pembina	Rekomendasi Instansi Pembina	Usulan Persetujuan ke MENPANRB	Persetujuan MENPANRB
1	Analisis Hukum	SEKRETARIAT DAERAH	Kemenkumham	√	√	√	√
2	Analisis Kebijakan		LAN RI	√	√	√	√
3	Penerjemah		Sekretariat Negara RI	√	√	√	√
4	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		LKPP	√	√	√	√
5	Perancang Peraturan Perundang-Undangan		Kemenkumham	√	√		
6	Penyuluh Hukum		Kemenkumham	√	√	√	√
7	Perisalah Legislatif	Sekretariat DPRD	Setjen DPR RI				
8	Auditor	Inspektorat	BPKP	√	√	√	√
9	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah		Kemendagri	√	√	√	√



PROGRESS PENETAPAN FORMASI JF

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	UNIT PEMBINA	INSTANSI PEMBINA	Usulan ke Instansi Pembina	Rekomendasi Instansi Pembina	Usulan Persetujuan ke MENPANRB	Persetujuan MENPANRB
10	Teknik Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
11	Teknik Pengairan						
12	Teknik Penyehatan Lingkungan/Penata Kelola Penyehatan Lingkungan						
13	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan						
14	Pembina Jasa Konstruksi						
15	Penata Ruang						
16	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi				

➤ PROGRESS PENETAPAN FORMASI JF

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	UNIT PEMBINA	INSTANSI PEMBINA	Usulan ke Instansi Pembina	Rekomendasi Instansi Pembina	Usulan Persetujuan ke MENPANRB	Persetujuan MENPANRB
17	Penata Kelola Perumahan	Disperkim	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
18	Analisis Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Kementerian Dalam Negeri	√	√	√	√
19	Pemadam Kebakaran			√	√	√	√
20	Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja		√			
21	Pekerja Sosial	Dinas Sosial	Kementerian Sosial	√	√	√	√
22	Penyuluh Sosial			√	√	√	√
23	Instruktur	Dinas Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	√	√		
24	Mediator Hubungan Industrial			√	√		
25	Pengantar Kerja			√	√		

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	UNIT PEMBINA	INSTANSI PEMBINA	Usulan ke Instansi Pembina	Rekomendasi Instansi Pembina	Usulan Persetujuan ke MENPANRB	Persetujuan MENPANRB
26	Penata Kepenedudukan dan Keluarga Berencana	Dinas KB	BKKBN				
27	Pengawas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
28	Pengendali Damapak Lingkungan						
29	Penyuluh Lingkungan Hidup						
30	Administrator Database Kependudukan	Disdukcapil	Kementerian Dalam Negeri				
31	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan						
32	Penguji Kendaraan Bermotor	Dishub	Kementerian Perhubungan	√	√	√	√
33	Pranata Hubungan Masyarakat	Diskominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika				
34	Pranata Komputer		dan Pusat Statistik				
35	Sandiman		Badan Siber dan Sandi Negara				
36	Statistisi		Badan Pusat Statistik				

➤ PROGRESS PENETAPAN FORMASI JF

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	UNIT PEMBINA	INSTANSI PEMBINA	Usulan ke Instansi Pembina	Rekomendasi Instansi Pembina	Usulan Persetujuan ke MENPANRB	Persetujuan MENPANRB
37	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disbudpar	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	√	√	√	√
38	Pamong Budaya		Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi				
39	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Dinas Pertanian	Kementerian Pertanian				
40	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian						
41	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian						
42	Medika Veteriner						
43	Paramedik Veteriner						
44	Pengawas Benih Tanaman						
45	Pengawas Bibit Ternak						

➤ PROGRESS PENETAPAN FORMASI JF

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	UNIT PEMBINA	INSTANSI PEMBINA	Usulan ke Instansi Pembina	Rekomendasi Instansi Pembina	Usulan Persetujuan ke MENPANRB	Persetujuan MENPANRB
46	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Dinas Pertanian	Kementerian Pertanian				
47	Pengawas Mutu Pakan						
48	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan						
49	Penyuluh Pertanian						
50	Analisis Akuakultur	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan				
51	Analisis Ketahanan Pangan		Kementerian Pertanian	√	√	√	√
52	Analisis Pasar Hasil Perikanan		Kementerian Kelautan dan Perikanan				
53	Pengawas Perikanan		Kementerian Kelautan dan Perikanan				
54	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap						



PROGRESS PENETAPAN FORMASI JF

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	UNIT PEMBINA	INSTANSI PEMBINA	Usulan ke Instansi Pembina	Rekomendasi Instansi Pembina	Usulan Persetujuan ke MENPANRB	Persetujuan MENPANRB
55	Analisis Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kementerian Perdagangan	√	√	√	√
56	Pembina Industri		Kementerian Perindustrian	√			
57	Penera		Kementerian Perdagangan	√	√	√	√
58	Pengamat Tera		Kementerian Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√
59	Pengawas Kemetrolgian			√	√	√	√
60	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan		Kementerian Perdagangan	√	√	√	√
61	Pengawas Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah					

➤ PROGRESS PENETAPAN FORMASI JF

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	UNIT PEMBINA	INSTANSI PEMBINA	Usulan ke Instansi Pembina	Rekomendasi Instansi Pembina	Usulan Persetujuan ke MENPANRB	Persetujuan MENPANRB
62	Arsiparis	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Arsip Nasional Republik Indonesia				
63	Pustakawan		Perpustakaan Nasional	√			
64	Penata Perizinan	DPMPTSP	Kementerian Dalam Negeri				
65	Penggerak Swadaya Masyarakat	DPMD	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	√	√	√	√
66	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	BKPSDM	Badan Kepegawaian Negara	√	√	√	√
67	Analisis Pengembangan Kompetensi						
68	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur			√	√	√	√
69	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur			√	√		
70	Peneliti	BAPELITBANGDA	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia				
71	Perencana		Badan Perencanaan Pembangunan Nasional				

➤ PROGRESS PENETAPAN FORMASI JF

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	UNIT PEMBINA	INSTANSI PEMBINA	Usulan ke Instansi Pembina	Rekomendasi Instansi Pembina	Usulan Persetujuan ke MENPANRB	Persetujuan MENPANRB
72	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kementerian Keuangan	√	√	√	√
73	Penata Laksana Barang						
74	Analisis Kebencanaan	BPBD	Badan Nasional Penanggulangan Bencana				
75	Penata Penanggulangan Bencana						
76	Penata Kelola Penanaman Modal	DPMPTSP	Kementerian Investasi/BKPM				

ANGKA KREDIT???

MASIH ADA???

- ✗ DUPAK
- ✗ BUTIR KEGIATAN
- ✓ PREDIKAT KINERJA



DINAMIKA ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

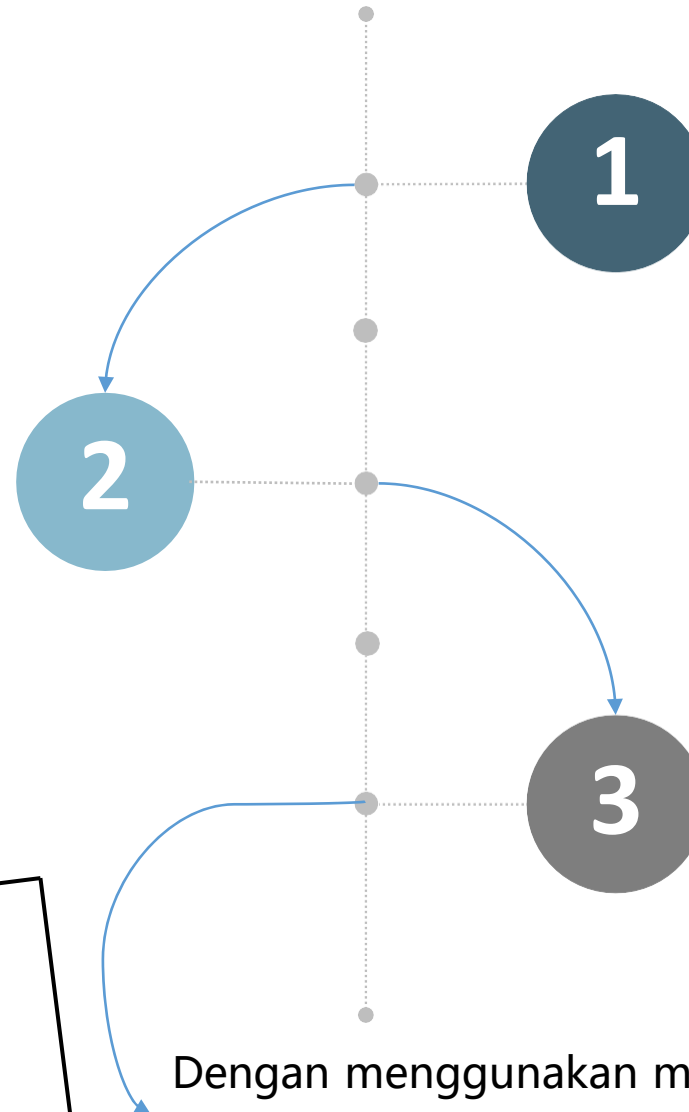
<i>Metode</i>	<i>Tahun Penggunaan</i>	<i>Dasar Hukum</i>	<i>Karakteristik AK</i>
1 <i>Konvensional</i>	<i>Sebelum 2019</i>	<i>Permenpan masing-masing JF</i>	<i>Diakumulasikan sejak awal menduduki JF</i>
2 <i>Integrasi</i>	<i>2019 - 2022</i>	<i>Permenpan 13 Tahun 2019 & PerBKN 11 Tahun 2022</i>	<i>Diakumulasikan di dalam jenjang yang sama</i>
3 <i>Konversi</i>	<i>2023 sampai seterusnya</i>	<i>Permenpan 1 Tahun 2023</i>	

PERALIHAN METODE PENILAIAN ANGKA KREDIT



Integrasi
Jumlahkan Akumulasi AK
Integrasi dengan AK
Konversi yang telah
dinilai

Surat Deputi Mutasi
5392/B-MP.01.04/SD/DII/2023
Tentang Percepatan Layanan Kenaikan
Pangkat Periode 1 Oktober 2023



Konvensional

Lakukan Penyesuaian AK
sesuai ketentuan PerBKN
No. 3 Tahun 2023

Konversi

Lakukan Penyesuaian AK
sesuai ketentuan PerBKN
No. 3 Tahun 2023

Dengan menggunakan metode Konversi AK
seterusnya diperoleh dari predikat kinerja



Pemerintah Kabupaten Cirebon

Terima Kasih

